

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan tema penelitian yang akan melihat bagaimana peran pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan yang dihasilkan pada kegiatan musrenbangdes berdasarkan teori deliberatif dalam pengambilan keputusan sebagaimana pernyataan Habermas dalam (Tresiana, 2015:68), yang menyimpulkan bahwa terdapat tiga poin makna yang tersirat dalam teori tersebut, yakni :

- a. Pengaruh : kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan pembuatan keputusan; pengaruh pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Musrenbang masyarakat terlihat tidak terlalu aktif dikarenakan pemerintah desa tidak memberikan ruang yang bebas kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi bersama dalam pengambilan keputusan program kerja, akan tetapi sebelum pelaksanaan musrenbang pemerintah desa dan BPD sudah merencanakan terlebih dahulu program-program kerja, dan program-program kerja tersebut yang lebih diprioritaskan dibandingkan usulan dari masyarakat.
- b. Keterbukaan/keterlibatan : perwakilan penduduk, keterbukaan pandangan dan nilai-nilai yang beragam, serta kesempatan yang sama untuk berpartisipasi; Pengambilan keputusan masyarakat Desa Baumata dalam menentukan arah pembangunan Desa Baumata salah satunya dapat dilihat dalam musyawarah rencana peraturan desa dan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (RanPerDes dan APBDes) dalam musyawarah ini dibahas perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Baumata.

c. Deliberasi : komunikasi terbuka, akses informasi, ruang untuk memahami dan membingkai ulang berbagai isu, saling menghormati, dan gerakan menuju consensus; adanya partisipasi masyarakat dalam menghadiri pertemuan musyawarah, namun partisipasi masyarakat dalam memberikan ide tau gagasan berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan desa masih terlihat rendah, kebanyakan masyarakat Desa Baumata Pusat menghadiri rapat hanya untuk memenuhi undangan; adanya budaya patriarki yang masih melekat didalam kehidupan masyarakat Desa Baumata.

Kegiatan musrenbangdes Baumata Kecamatan Taebenu terlaksana, namun gagal dalam penerapan teori deliberatif dalam pengambilan keputusan. Dikarenakan dalam pelaksanaannya musrenbang Desa Baumata Kecamatan Taebenu menghadapi faktor-faktor kelemahan yang menjadikan musrenbang terlihat hanya sebatas formalitas, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat minim, banyaknya usulan dan hasil kegiatan yang berasal dari pihak yang mempunyai kepentingan sendiri, musyawarah yang berjalan kurang baik, dan kegiatan hasil musrenbang yang tidak dilaksanakan.

Namun musrenbang tetap terlaksana dikarenakan ada faktor keberhasilan dalam pelaksanaannya. Faktor keberhasilan tersebut adalah adanya undang-undang sebagai peraturan yang jelas mengenai pelaksanaan musrenbang, banyaknya masyarakat yang mendukung pelaksanaan musrenbang sehingga musrenbang dapat dilaksanakan, tidak hanya sampai disitu kepercayaan masyarakat desa kepada para pemangku sebagai perwakilan dalam menyuarkan aspirasi

masyarakat juga menjadi faktor keberhasilan dalam musrenbangdes Baumata.

B. Saran

1. Pemerintah harus bisa merangkul dan memberikan pemahaman tentang musrenbang kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui pentingnya keterlibatan mereka dalam pembuatan keputusan dan antusias untuk mengikuti musrenbang. Misalkan dengan diadakannya sosialisasi tentang musrenbang.
2. Pemerintah harus menginstruksikan pelaksanaan musrenbang sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Pemerintah harus melakukan pengawasan lebih ketat lagi terhadap pelaksanaan musrenbang, dan sebaiknya perekrutan kepanitiaan musrenbang dilaksanakan secara terbuka dan tidak sepenuhnya diserahkan oleh aparat atau kepala desa sehingga seluruh masyarakat desa memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi wakil masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang desa.
3. Aparatur desa yang dalam hal ini dipimpin oleh Kepala Desa harus bisa menjadi wadah untuk menampung dan menerima bahwa hasil musyawarah yang mufakat lah yang seharusnya menjadi hasil akhir musrenbang bukan hasil keputusan aparat ataupun kelompok-kelompok yang berkepentingan, aparat lebih menghargai musyawarah dibandingkan dengan kekuasaannya.
4. Pemerintah harus mengoptimalkan kinerja dalam melaksanakan pembangunan yang sudah disetujui, dengan tidak memperlamban pencairan dana untuk pembangunan Desa Baumata yang berasal dari APBD. Hal ini agar pembangunan Desa Baumata Kecamatan Taebenu dapat berjalan dengan optimal dengan biaya operasional yang lancar.

5. Masyarakat Desa Baumata hendaknya bersabar dan bisa menunggu pembangunan yang akan dilaksanakan, hal ini dikarenakan dalam proses pembangunan tersebut ada tahapan demi tahapan yang harus dilalui.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*.

Erlangga. Yogyakarta. Moleong, Lexy J. 2011. *Metode*

Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya. Nugroho, Riant.

2005. *PublicPolicy*. Jakarta: Alex Media Komputindo.

Parson, Wayne, 2008. *Public Policy (Pengantar Teori Praktis Analisis Kebijakan)*.

Jakarta: Kencana.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulistio, Eko Budi. 2013. *Kebijakan Publik (Public Policy), Buku Ajar Kebijakan Publik*. Bandarlampung: FISIP Universitas Lampung.

Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.

Tresiana, Novita. 2015. *Rasionalitas dan Pembuatan Keputusan Kebijakan*.

Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Malang.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*.

Yogyakarta: CAPS.

Jurnal/Artikel :

Sobari, Wawan. 2007. *Peningkatan Partisipasi Publik di Era Otonomi Daerah Masih Sebatas Instrumen*. Artikel pada berita Yayasan Inovasi Pemerintah Daerah (YIPID), Jakarta.

Sumber lain :

Djohani, Rianingsih (Studio Driya Media-OC FPPM). 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

LAMPIRAN



Gambar 1. Wawancara bersama Kepala Desa Baumata



Gambar 2. Wawancara bersama Ketua BPD



Gambar 3. Wawancara bersama Ketua Karang Taruna



Gambar 4. Wawancara bersama Ketua Adat



Gambar 5. Wawancara bersama Bapak Dusun V



Gambar 6. Wawancara bersama Ibu Ketua PKK



Gambar 7. Wawancara bersama seorang Ibu yang tidak Hadir dalam Musrenbang